

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DALAM JUAL BELI ELEKTRONIK  
(Studi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**Dinia Sebwindi  
NPM.1621030096**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DALAM JUAL BELI ELEKTRONIK  
(Studi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**Dinia Sebwindi  
NPM.1621030096**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H /2020 M**

## ABSTRAK

Transaksi elektronik yaitu transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. Transaksi jual beli di dunia maya mempermudah masyarakat dalam mencari barang-barang yang diinginkan tanpa harus keluar rumah dan mempermudah penjual dalam memasarkan barang-barangnya dengan modal yang minim. Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat di masyarakat baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Sehingga memengaruhi kemajuan dalam bidang muamalah, yaitu adanya inovasi dalam sistem pemasaran yang tidak hanya secara manual melainkan secara modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memasarkan suatu produk. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) telah mengatur dalam transaksi elektronik yaitu dalam melakukan transaksi elektronik harus cakap hukum. Menggunakan akun sosial media telah ditentukan batas umur minimum 17 tahun atau cakap hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya. 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 82 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam jual beli barang elektronik di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pandangan hukum Islam tentang implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini yaitu penulis memperoleh data lapangan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang berkaitan tentang pelaksanaan Pasal 47 PP No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur berupa jual beli *handphone* melalui akun *facebook* bahwa adanya suatu pelanggaran dan penyalahgunaan dengan mereka membuat sebuah akun *facebook*. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu masih berusia 15 tahun, berakal dan belum dapat mengelola harta sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual-beli. Pelaku akad ialah orang yang diperbolehkan dalam melakukan akad yaitu orang yang telah balig, berakal, dan memiliki kematangan dalam berfikir maupun dalam bertindak.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinia Sebwinda

NPM : 1621030096

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dalam Jual Beli Elektronik (Studi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang)**” adalah benar-benar ataupun merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2020  
Penulis,

Dinia Sebwinda  
NPM. 1621030096



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tepp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN  
2012 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM  
TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK DALAM JUAL  
BELI BARANG ELEKTRONIK ( STUDI DI DESA  
DWI WARGA TUNGGAL JAYA, KAB. TULANG  
BAWANG)**

**Nama : Dinia Sebwindi**  
**NPM : 1621030096**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Drs. H. M, Wagianto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196201111994031001**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197512302003121002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.Si.**  
**NIP. 197807252009121002**

## MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (anak yatim yang belum balig (dewasa) atau orang dewasa tidak dapat mengatur hartanya), harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

(Q.S An-Nisa (4): 5)<sup>1</sup>



---

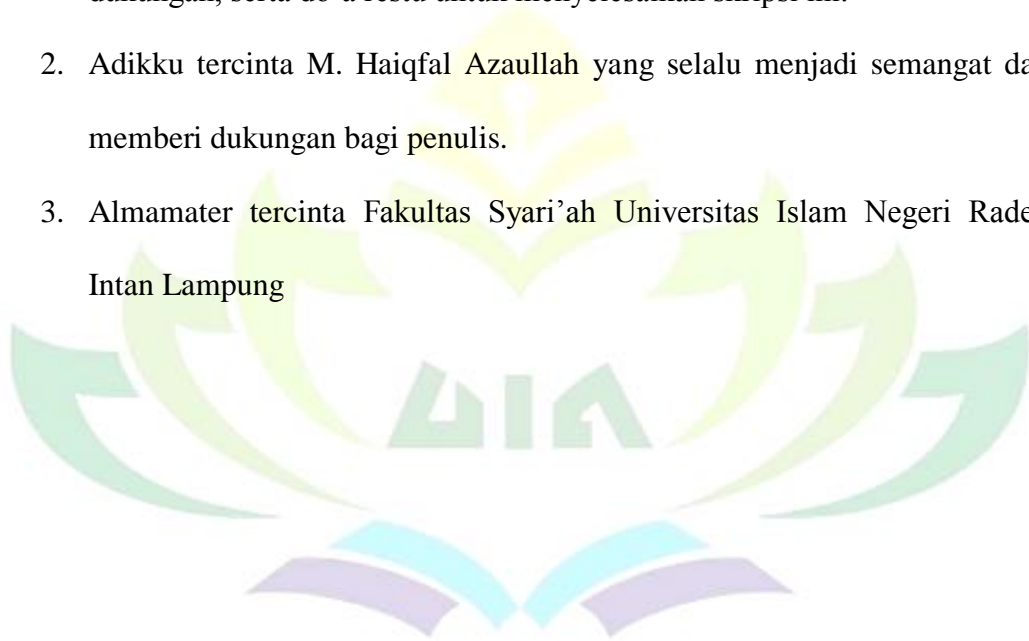
<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 77

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'alamiin*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Karya ilmiah sederhana yang dibuat dengan penuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Nazaruddin M. Ali dan Ibunda Kusmiati yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada batas, semangat, dukungan, serta do'a restu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tercinta M. Haiqfal Azaullah yang selalu menjadi semangat dan memberi dukungan bagi penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

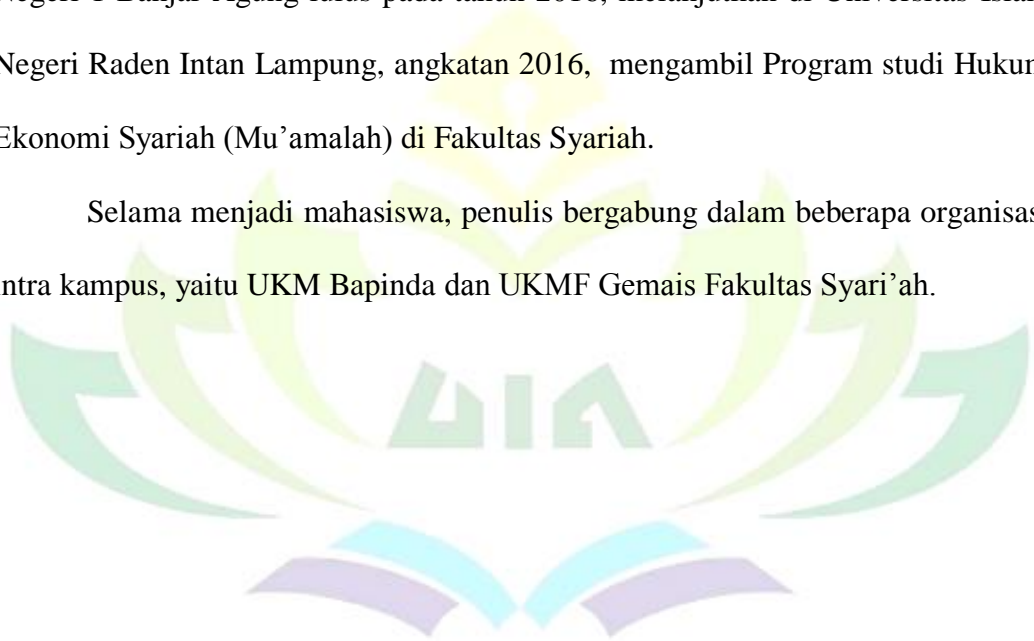


## **RIWAYAT HIDUP**

Dinia Sebwindi lahir di Pringsewu pada tanggal 17 September 1998, putri sulung dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Nazaruddin M.Ali dan Ibu Kusmiati.

Pendidikan yang ditempuh di TK Makarti Mukti Tama Dwi Warga Tunggal Jaya lulus pada tahun 2005, SD Negeri 1 Dwi Warga Tunggal Jaya lulus pada tahun 2010, SMP Negeri 2 Banjar Agung lulus pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Banjar Agung lulus pada tahun 2016, melanjutkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, angkatan 2016, mengambil Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) di Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung dalam beberapa organisasi intra kampus, yaitu UKM Bapinda dan UKMF Gemais Fakultas Syari'ah.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dalam Jual Beli Elektronik (Studi Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis hanturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.SI., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa.
3. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan serta waktu luang untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan serta waktu luang untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dalam mencari ilmu serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para pengurus dan kader UKM Bapinda dan UKMF Gemais yang telah mewarnai dalam berorganisasi.
8. Sahabat seperjuangan Niken Purnama Sari, Suci Saulia Afifah Z.A. dan Zikrin Julian Lestari yang senantiasa memberi semangat, dukungan dalam penyusunan skripsi.
9. Sahabat kecil Nurul Khotimah dan Esti Dwi Oktaviani yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
10. Keluarga KKN kelompok 96 Desa Merabung ( April, Berry, Desi, Guntur, Ilham, Nurul, Riki, Resa, Titin, Yurnedi, dan Zahro).
11. Teman-teman seperjuangan Muamalah B angkatan 2016 yang selalu kompak.
12. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Untuk perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis

serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Juli 2020

**Dinia Sebwindi**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	5
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikasi Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian .....	11
 <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	 <b>16</b>
A. Kajian Teori .....	16
1. Jual Beli.....	16
a. Pengertian Jual Beli .....	16
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	32
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	35
e. Resiko .....	36
f. Jual Beli Yang Dilarang .....	37
g. JualBeliE-commerce .....	45
2. Transaksi Elektronik .....	47
a. Pengertian Transaksi Elektronik.....	47
b. Dasar Hukum Transaksi Elektronik .....	47
c. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik .....	58
d. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Transaksi Elektronik .....	59
e. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik .....	61
f. Mekanisme Transaksi Elektronik .....	64
g. Permasalahan Dalam Transaksi Elektronik.....	65
h. <i>Cyber Crime</i> .....	66

3. Perlindungan Konsumen .....	68
a. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	68
b. Asas Perlindungan Konsumen .....	68
c. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	69
d. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	70
e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	75
f. Larangan-Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	75
g. Lembaga-lembaga yang BerperanPerlindungan Konsumen .....	76
B. Tinjauan Pustaka.....	81
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>91</b>
A. Profil Desa Dwi Warga Tunggal Jaya .....	91
1. Sejarah Singkat.....	91
2. Letak Geografis .....	92
3. Sosial Budaya .....	93
4. Sejarah Pejabat Kepala Kampung .....	94
5. Sejarah Pembangunan Kampung .....	95
6. Sarana dan Prasarana Kampung.....	96
B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pada Masyarakat.....	96
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>100</b>
A. Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan PemerintahNo. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya .....	100
B. Analisis hukum Islam Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Islam (PSTE) di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya.....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	106
B. Rekomendasi.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Provinsi Lampung
2. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kabupaten Tulang Bawang
3. Surat Izin Penelitian Desa Dwi Warga Tunggal Jaya
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Pernyataan Wawancara



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum penulis memasuki tahap pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan maksud penulisan judul ini untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai. Adapun istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Hukum Islam Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dalam Jual Beli Elektronik”** sebagai berikut :

##### **1. Analisis**

Secara harfiah (etimologis) analisis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *analysis* yang berarti suatu uraian pikiran mendalam, sistematis, dan rasional.<sup>1</sup> Penulis menganalisis secara hukum Islam maupun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam jual beli elektronik.

##### **2. Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan<sup>2</sup>. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan

---

<sup>1</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h 6

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h 529

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>3</sup> Implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam jual beli barang elektronik.

### 3. Hukum Islam

Secara bahasa kata “hukum” berasal dari kata Arab, *hukm* (jamak dari *ahkam*) yang memiliki arti putusan, ketetapan, perintah, pemerintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.<sup>4</sup> Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>5</sup> Hukum Islam mengacu kepada hukum yang seluas-luasnya. Ia tidak hanya berkenaan dengan hubungan antara manusia (hamba) dan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam semesta.<sup>6</sup> Penulis mengacu pada pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan dalam jual beli elektronik.

### 4. Penyelenggaraan

Orang yang menyelenggarakan proses, cara, perbuatan menyelenggarakan.<sup>7</sup> Penyelenggaraan sistem transaksi elektronik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>3</sup>Dewi Kartika Pane, “Implementasi Data Mining Pada Penjualan Produk Elektronik Dengan Algoritma Apriori (Studi Kasus : Kreditplus)”, *Pelita Informatika Budi Darma*, Volume : IV Nomor: 3, Agustus 2013, h 26

<sup>4</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 41

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h 42

<sup>6</sup>Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani, 1996), h 101

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) h 1020



## 5. Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11/2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.<sup>8</sup> Kegiatan jual beli berupa barang elektronik.

## 6. Jual Beli

Secara etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan secara istilah adalah menukar barang dengan suatu barang yang lain dengan cara akad.<sup>9</sup>

## 7. Barang Elektronik

Suatu barang yang sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai aktifitas, salah satunya yaitu handphone yang membantu manusia sebagai alat komunikasi, untuk mendapatkan informasi dan hiburan.<sup>10</sup>

## 8. Pasal 47

- a. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak

---

<sup>8</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* ,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), h 57

<sup>9</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), h 110-111

<sup>10</sup>Dewi Kartika Pane, "Implementasi Data Mining Pada Penjualan Produk Elektronik Dengan Algoritma Apriori (Studi Kasus : Kreditplus)", *Pelita Informatika Budi Darma*, Volume : IV Nomor: 3, Agustus 2013, h 25

b. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang yang meakili sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah berubah menjadi Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah:

1. Alasan Objektif, menganalisis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 47 yang belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat.
2. Alasan Subjektif, Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas dari segi peraturan pemerintah, maupun tempat penelitian, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yaitu mengenai **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Hukum Islam Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang**

**Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dalam Jual Beli Elektronik.”**Ditinjau dari segi penelitian skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang

Pada era modern perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat di masyarakat baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Sehingga memengaruhi kemajuan dalam bidang muamalah, yaitu adanya inovasi dalam sistem pemasaran yang tidak hanya secara manual melainkan secara modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memasarkan suatu produk. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan sebagai cara yang efektif dalam hal bermuamalah terutama dalam hal jual beli.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Agar proses jual-beli dapat terlaksana sesuai dengan aturan Islam, perlu diperhatikan rukun jual-beli.<sup>11</sup> Salah satu jual-beli adalah *'aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>13</sup> Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya

---

<sup>11</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), h 26

<sup>12</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), h 126

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h 167

tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatnya, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.<sup>14</sup>

Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan jual beli dapat kita temukan didalam QS. Al An-Nisa (4): 5

هُم وَقُولُوا أَكْسُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ قِيَمًا لِّمَّا لَلَّهِ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السَّفَهَاءُ تُؤْتُوا وَلَا  
مَعْرُوفًا قَوْلًا<sup>1</sup>

Artinya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs. An-Nisa (4):5)<sup>15</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi pihak yang berakad.<sup>16</sup> Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *Mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.<sup>17</sup> *Mumayyiz* adalah berasal dari kata *mayyaza* yang artinya menyisihkan. Adapun menurut istilah, *mumayyiz* ialah sebutan untuk anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>*Ibid*, h 171

<sup>15</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 77

<sup>16</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rja GrafindoPersada, 2016), h 69

<sup>17</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h 111

<sup>18</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*....h 160

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.<sup>19</sup> Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi.<sup>20</sup> Transaksi jual beli di dunia maya mempermudah masyarakat dalam mencari barang-barang yang diinginkan tanpa harus keluar rumah dan mempermudah penjual dalam memasarkan barang-barangnya dengan modal yang minim. Pada umumnya *marketplace*, *whatsapp* dan media sosial lainnya. Cara mengakses media sosial pun sudah ditetapkan batas minimal umur yang sesuai dengan hukum atau sudah cakap hukum. Namun, masih ada saja oknum yang memanipulasi data elektronik. Misalnya, membuat akun facebook sudah ada ketentuan khusus untuk orang dewasa yang berusia minimal 17 tahun tetapi banyak pengguna facebook yang masih di bawah umur, dalam hal ini anak yang belum cakap hukum tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi elektronik. Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h 40

<sup>20</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 30

Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah yang berkonflik dengan hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan rujukan di atas, menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dalam Islam jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cakap hukum tidak memenuhi syarat dan rukun jual-beli. Transaksi elektronik telah masuk ke dalam dunia anak-anak dan menggunakannya tanpa pengawasan orangtua. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi perempuan), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) telah mengatur transaksi elektronik, namun aturan ini belum diterapkan oleh masyarakat, sehingga masih ada anak-anak yang menggunakan transaksi elektronik tanpa pengawasan orangtua.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) bisa sejalan dengan hukum Islam agar meminimalkan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak-

---

<sup>21</sup>M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 32-33

<sup>22</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 142

anak yang belum cakap hukum. Pada Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dalam penelitian ini penulis mendapati seorang anak yang bernama Aljri usia 14 tahun melakukan transaksi elektronik yaitu jual beli handphone android melalui akun facebook miliknya dengan sistem bayar di tempat, kemudian seorang anak bernama Haikal usia 13 tahun yang melakukan transaksi elektronik yaitu jual beli handphone dengan sistem tukar tambah.

Berdasarkan penelitian ini penulis menduga bahwa adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya dengan menggunakan media sosial, dalam penggunaan media sosial sudah ditetapkan batasan umur, tetapi Aljri dan Haikal telah memanipulasi data penggunaan media sosial. Sehingga dapat bertransaksi melalui media sosial.

Selanjutnya untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE), penulis tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dalam Jual Beli Elektronik.”**



#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini penulis fokus pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) terhadap jual beli elektronik bahwa syarat dalam transaksi elektronik haruslah cakap hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan adakalanya peneliti justru menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang.<sup>23</sup>

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) terhadap jual beli elektronik di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 82 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dalam jual beli barang elektronik di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan jual beli elektronik Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE).

---

<sup>23</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 110



2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang implementasi Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) terhadap jual beli elektronik.

### **G. Signifikasi Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang dapat dipahami dan dipelajari lebih lanjut oleh masyarakat dalam bermuamalah sesuai dengan hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam bidang hukum untuk mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menemukan fakta baru yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat dalam “Implementasi Hukum Islam Tentang Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik”. Dalam hal

ini penulis mengamati mengenai transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak-anak.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menjabarkan atau menguraikan situasi tertentu.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

## 2. Sumber Data

Data dari sudut ilmu sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai.<sup>25</sup> Data tidak otomatis memberikan informasi yang bermanfaat. Data perlu dianalisis, diklasifikasikan, diseleksi, dipilah-pilah hingga menjadi bermakna. Data diperoleh dari sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>26</sup> objek penelitian, responden penelitian, atau dokumen-dokumen, baik yang dipublikasikan atau tidak.<sup>27</sup> Adapun sumber data di bagi menjadi data primer dan data sekunder.

---

<sup>24</sup>Kris H. Timotis, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), h 71

<sup>25</sup>Hesein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h 41

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h 172

<sup>27</sup>Kris H. Timotis, *Pengantar Metode Penelitian*,... h 63-64

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti halnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>28</sup>
- b. Data Sekunder, merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk tabel-tabel, diagram<sup>29</sup>, dokumen maupun foto. Penulis menggunakan data ini sebagai data untuk melengkapi penelitian.

### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (*area*) atau objek penelitiannya. Seandainya para peneliti ingin menyimpulkan sesuatu aspek tertentu dalam wilayah tertentu atau terhadap peristiwa tertentu, ia perlu menentukan terlebih dahulu apa batasan wilayah, objek, atau peristiwa yang akan diselidikinya. Wilayah, objek, atau individu yang diselidiki mempunyai karakteristik tertentu, yang akan mencerminkan atau memberi warna pada hasil penelitian.<sup>30</sup> Populasi dari objek dalam penelitian ini yaitu 150 orang dari masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.

---

<sup>28</sup>Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h 178

<sup>29</sup>*Ibid*, h 202

<sup>30</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 145-146

## b. Sampel

Sampel dapat diartikan sebagai contoh yang mewakili populasi.<sup>31</sup> Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>32</sup> Jika sifat populasi *homogen*, jumlah sampelnya kecil saja.<sup>33</sup> Apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya lebih besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih<sup>34</sup>, karena populasi dari penelitian ini berjumlah 150 orang, maka penulis akan mengambil sebanyak 10% dari jumlah populasi. Sehingga, jumlah sampelnya adalah sebanyak 15 orang yang melakukan transaksi elektronik. Penelitian ini penulis menetapkan dalam sampelnya menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Adapun kriteria penarikan sampel yaitu anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun yang melakukan transaksi elektronik dalam jual beli barang elektronik, pelaku usaha, dan tanggapan masyarakat.

---

<sup>31</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h 34

<sup>32</sup>Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), h 124

<sup>33</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h 96

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h 188

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>35</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>36</sup>

##### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.<sup>37</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data

##### a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangkan kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h 70

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h 135

<sup>37</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,..... h 391

<sup>38</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*,...h 153

#### b. Sistematika Data

Sistematika data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan data yang berdasarkan urutan masalah penelitian.

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.<sup>39</sup> Analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya.<sup>40</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang berbentuk kata-kata tersebut disishkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi data tersebut.<sup>41</sup> dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data ini penulis memperoleh data dari berbagai literatur, perundang-undangan, dan kasus yang berkaitan. Kemudian data tersebut di olah mengenai pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>39</sup>Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,...h 166

<sup>40</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h 115

<sup>41</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*,... h 282

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmadi, C. N. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmadi, C. N. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad, A. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad, A. (1996). *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, D. O. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatah, R. A. (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga.
- Hidayat, S. d. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bnadung: Mandar Maju.
- Hidayat, S. d. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Ja'far, A. K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Ja'far, A. K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Khoerudin, H. S. (2019). *Fikih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Khoerudin, H. S. (2019). *Fikih Muamalah*. Bndung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdalarya.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, D. P. (2011). Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineksa Cipta.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Pane, D. K. (2013). Implementasi Data Mining Pada Penjualan Produk Algoritma Apriori (studi Kasus : Kreditplus). *Pelita Informatika Budi Dharma*, IV, 26.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Timotis, K. H. (2017). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi.



Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI OFFEST.

Umar, H. (2000). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wajadi, S. K. (2012). *Hukuim Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wajadi, S. K. (2012). *Hukum Ekonimi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay' yaitu bentuk masdar dari ba'a – yab'u – bay'an yang artinya menjual dan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-syira' yaitu mashdar dari kata syara' yang artinya membeli.<sup>1</sup> Dalam Fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual-belikan, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu : a) Jual beli *mutlaqah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan uang, b) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli yang melakukan pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya, c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli yang melakukan pertukaran antara barang satu dengan barang yang lainnya.<sup>2</sup>

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُقَا بَلَاءُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ ۖ

Artinya:

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain

Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

---

<sup>1</sup> Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h 155

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 76-77

Firman Allah dalam QS. Fathir ayat 29 mengatakan:

إِنَّا لِلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.<sup>3</sup>

Menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yakni berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-ba'i* dalam terminologi fiqh digunakan untuk pengertian dari *ai-syira'* yang memiliki arti membeli.<sup>4</sup>

Menurut para Ulama dalam mendefinisikan jual beli antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah:

مُبَا دَ لُهُ مَا لِي بِمَالٍ عَلَ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 437

<sup>4</sup> Hasani Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (Bandar Lampung: Syariah Press, 2014), h 244

Artinya:

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan khusus (yang di bolehkan).<sup>5</sup>

b. Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan<sup>6</sup>

c. Menurut Ibnu Qudamah:

مُبَادَلَةٌ أَلْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya:

Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik<sup>7</sup>

Menurut hukum perdata jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1475 KUHPdt).<sup>8</sup> Perbuatan jual beli mencakup tiga syarat, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan ialah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Pembayaran ialah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Alauddin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V. h 133

<sup>6</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*. Juz II, h 2

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 73-74

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h 317

<sup>9</sup> Ibid, h 316

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami bahwa jual beli ialah suatu kegiatan pertukaran barang satu dengan barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli dilakukan sebagai pertukaran harta melalui persetujuan, penyerahan, dan pembayaran untuk berakhirnya suatu hak kepemilikan suatu barang atau harta. Jual beli disebut juga sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan suatu barang atau harta yang telah disepakati.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

##### **1) Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam hukum Islam, di dalamnya terdapat hal yang menjelaskan tentang hukum Islam termasuk hal ihwal yang berkaitan dengan jual-beli.<sup>10</sup>

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ  
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

<sup>10</sup> Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h 32

عَادَ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila (orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan).. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya (riba yang sudah diambil sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>11</sup>

Riba ialah suatu kebakhilan, kekotoran, kerakusan, dan mementingkan diri sendiri.<sup>12</sup> Firman Allah, “Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ”Sesungguhnya mereka membolehkan riba tiada lain untuk membantah suatu hukum-hukum Allah yang ada dalam syariat-Nya. Firman Allah, “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” yang menuntaskan ayat ini dapat ditafsirkan sebagai bantahan atas pandangan mereka yang menolak ketetapan Allah,

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 47

<sup>12</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah-Al-Baqarah) Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) h 373

padahal mereka sudah mengetahui penilaian Allah atas hukum yang satu dengan lainnya.<sup>13</sup>

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 1999) h 452

untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup>

Zahir nash ini menunjukkan bahwa tidak menulisnya itu merupakan *rukhsah* dan tidak berdosa, tetapi mempersaksikannya adalah wajib. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa persaksian itu hanya bersifat anjuran (*nadb*) dan tidak wajib, tetapi pendapat yang terkuat ialah yang wajib itu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Sekarang telah selesailah persyariatan (pengaturan) masalah utang-piutang dan jual beli secara tunai. Keduanya bertemu pada suatu syarat yang berupa penulisan dan persaksian,

---

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 48



sebagai suatu kewajiban dan *rukhsakh*. Maka, dalam hal ini ditetapkanlah hak-hak para ahli tulis dan saksi, sebagaimana telah ditetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebelumnya. Mereka telah diwajibkan untuk menulis dan menyaksikannya. Maka hak mereka menjadi wajib untuk menjaga dan memelihara, agar menjadi seimbang hak dan kewajiban atas tugas-tugas umum yang demikian.<sup>15</sup>

Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 5-6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (anak yatim yang belum balig (dewasa) atau orang dewasa tidak dapat mengatur hartanya), harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>16</sup>

وَابْتَلُوا الَّتِيَّمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ٦  
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ٦

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah-Al-Baqarah)* Jilid 1,.. h 394

<sup>16</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 77

Artinya:

Dan ujilah (mengadakan penyidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>17</sup>

Allah Ta'ala melarang memberikan kemungkinan kepada sufaha untuk mengelola harta kekayaan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagi manusia, harta yang diandalkan untuk menopang kehidupan mereka, seperti perdagangan dan sebagainya. Larangan itulah yang menjadi dasar perlindungan atas sufaha yang terdiri atas beberapa macam. Sufaha dapat berupa anak kecil, ia harus dilarang dalam mengelola hartanya karena pertimbangannya tidak dapat dijadikan patokan. Sufaha juga dapat berupa orang gila dan orang yang tidak cakap dalam mengelola hartanya dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan agamanya. Sufaha dapat berupa orang yang muflis, yaitu orang yang berutang dan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utang. Jika orang berpiutang menagih kepada yang berutang, maka hakim melarangnya untuk

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

menggunakan hartanya.<sup>18</sup> Tindakan dari masing-masing orang yang sempurna akal nya dan yang tidak sempurna akal nya itu bukanlah suatu yang samar. Oleh karena itu, pengujian terhadap anak yatim itu dilakukan untuk mengetahui kedewasaan yang diungkapkan oleh nash itu dengan kata nikahyakni suatu kondisi yang menjadi kelayakan orang yang sudah dewasa.<sup>19</sup>

Ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara membelanjakan harta, kemudian latihlah mereka dalam menggunakan harta itu sampai dengan mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit. Kemudian jika menurut pendapat kamu melalui uji mental tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa mereka betul-betul telah cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengolah harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu, sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menahan hartanya.<sup>20</sup> Akan tetapi, jika wali tersebut membutuhkannya, maka ia boleh mengambilnya seminimal mungkin. Semua aturan yang demikian diperketat, semua keterangan yang terperinci, dan semua peringatan ini sangat tepat untuk mencegah masyarakat dari bertindak suatu kezaliman terhadap harta

---

<sup>18</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*,... h 652

<sup>19</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran- An-Nisa' 70) Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 284

<sup>20</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 1*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h 214-215

anak-anak yang yatim yang lemah, supaya menjaga dan tidak boleh bermain-main dengan cara apapun.<sup>21</sup> Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi perempuan), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli (membelanjakan hartanya), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>22</sup>

Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran- An-Nisa' 70) Jilid 2.* h 284

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 142

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 83

Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara'. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, "Jika kamu suka, ambilah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham." Ibnu Abbas berkata, "Itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu secara batil." Sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Ayat itu muhkam. Ia tidak dinasakh dan menasakh hingga hari kiamat." Allah Ta'ala berfirman, "Kecuali dengan perdagangan suka sama suka di antara kamu." Maksudnya, janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.<sup>24</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

QS. An-Nur (24) : 37

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h 693-694

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا تَبْصُرُونَ

Artinya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari (di hari itu) hati yang penglihatan menjadi goncang.<sup>25</sup>

Kata (رجال) *rijal* dipahami oleh Ibn ‘Asyur dalam pengertian lawan dari kata perempuan. Ini menurutnya karena ada yang bertasbih di gereja adalah para rahib yang kesemuanya merupakan laki-laki. Mereka itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pujian yang diberikan kepada mereka disebabkan karena keimanan mereka ketika itu masih di nilai shahih.

Ayat di atas menggunakan kata (تجارة) *tijarah* dan (بيع) *bay’*. Keduanya biasa diterjemahkan jual beli. Sementara ulama memahami kata (تجارة) *tijarah* dalam arti membeli dan (بيع) *bay’* dalam arti menjual. Ada juga yang membedakannya dengan menyatakan bahwa kata *bay’* biasa digunakan untuk menggambarkan

<sup>25</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 355

telah terjadinya transaksi dan memperoleh suatu keuntungan, sedangkan kata *tijarah* menggambarkan profesi jual beli.<sup>26</sup>

Mereka yang bertasbih itu adalah orang-orang yang hatinya tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, betapapun besar usaha mereka dan tidak pula lalai dari melaksanakan salat dengan baik dan benar, serta konsisten, dan demikian menunaikan zakat secara sempurna.<sup>27</sup>

## 2) Hadis

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam termasuk dalam ekonomi. Hadis menempati kedudukannya setelah Al-Qur'an atau berada pada posisi kedua setelah Al-Qur'an.<sup>28</sup> Berikut diantaranya:

Miqdam r.a berkata:

عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

Artinya:

Dari Miqdam r.a., dari Rasulullah s.a.w sabdanya: “Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik daripada memakan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud a.s., makan dari hasil usaha tangan sendiri.” (H.R Bukhari)<sup>29</sup>

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 355-357

<sup>27</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim jilid 2*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016) h 159

<sup>28</sup> Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h 5

<sup>29</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, , *Terjemah Hadis Shahih Bukhari Juz I-IV Alih Bahasa Zainuddin Hamidy dkk*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h 2254



Jabir bin Abdullah r.a berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا  
سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:

“Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih.” (H.R Bukhari)<sup>30</sup>

Aisyah r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ  
مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ مَكَانَ قِيَا مِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرِفٍ.

Artinya:

Dari Aisyah r.a. Tentang firman Allah Ta’ala Qs. An-nisa ayat 6: “Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri darimemakan hartaanak yatim itu dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.” Bahwasannya jika seorang pemelihara itu miskin, maka ia boleh memakan sebagian harta itu sebagai upah perawatannya dengan cara yang baik. (H.R Bukhari)<sup>31</sup>

‘Abdullah ibn Umar berkata:

كَانُوا يَبْنَاءُ عُونَ الطَّعَامَ فِي أَغْلَالِ السُّوقِ فَيَبْعُوهُ نَهْ فِي مَكَانِهِمْ, فَتَهَا هُمْ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

Artinya:

<sup>30</sup> Ibid, h 255

<sup>31</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari Juz VI Alih Bahasa Achmad Sunarto dkk*(Semarang: Asy-Syifa’, 1993), h 153



Para Sahabat membeli makanan di ujung pasar, kemudian mereka menjualnya di tempat itu pula. Maka Rasulullah melarang mereka menjual makanan sebelum mereka mengangkutnya ke tempat lain (menerima). (Al Bukhary 34: 72, Muslim: 8, Al Li'lu-u wal Marjan 2: 155).<sup>32</sup>

Hakim ibn Hizam r.a berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : أَلْيَبْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قَالَ : " حَتَّى يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا, بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "

Artinya:

Rasulullah s.a.w, bersabda : “Dua orang yang berjual-beli mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah atau Nabi berkata: sehingga mereka berpisah”. Jika kedua-duanya berlaku benar dan memberi penjelasan yang betul, niscaya diberi berkatlah kepada mereka dalam jual-beli itu. Jika mereka menyembunyikan keadaan yang benar dan berdusta, niscaya dibinasakanlah keberkatan penjualan itu”. (Al Bukhary: 19, Muslim 21: 11, Al Li'lu-u wal Marjan 2: 156).<sup>33</sup>

Abu Hurairah r.a berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِخْلُقْ مَنْفَعَةً لِلسَّلْعَةِ بِرَحْمَةٍ لِلْكَسْبِ. (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a berkata: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda” Bersumpah itu dapat mempercepat lakunya barang dagangan tetapi menghilangkan berkahnya penghasilan.” (Bukhari dan Muslim)<sup>34</sup>

Abu Qatadah r.a berkata:

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

<sup>32</sup> Hasby Ash-shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis V*, (Jakarta: Handayani, 1977), h 424

<sup>33</sup> *Ibid*, h 431

<sup>34</sup> Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Annawawy, *Terjemah Riyadlus Shalihin Juz II Alih Bahasa H. Salim Bahreisy Cet. 12*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), h 535

: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمَحُوقُ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Qatadah r.a bahwasannya ia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda : “Jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam menjual barang karena sesungguhnya sumpah itu dapat mempercepat lakunya barang tetapi kemudian menghilangkan berkahnya”. (Riwayat Muslim)<sup>35</sup>

Dari Rifa’ah Ibn Rafi’

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)

Artinya:

“ Nabi s.a.w ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik.

Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah Ibn Rafi’)<sup>36</sup>

### 3) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>37</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>35</sup>Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Annawawy, *Terjemah Riyadlus Shalihin Juz II Alih Bahasa H. Salim Bahreisy Cet. 12*,... h 153

<sup>36</sup>Ali Muhyi al-Din ‘Ali, *Buhuts fi Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (Jeddah: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2003 M) h 92

<sup>37</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,... h 75

Rukun jual beli antara lain:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) *Ba'i* ( penjual )
- 4) *Mustari* (pembeli )
- 5) *Sighat* ( ijab dan qabul )
- 6) *Ma'qud 'alaih* ( benda dan barang )<sup>38</sup>

Syarat sahnya jual beli yaitu

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan jual beli. Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sebagai syarat mutlak keabsahan bagi keduanya.
- 2) Pelaku akad ialah orang yang diperbolehkan dalam melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jual-beli, orang gila, atau idiot tanpa dalam pengawasan walinya, kecuali dalam jual beli barang yang ringan nilainya seperti membeli makanan ringan.
- 3) Akad dalam transaksi antara jual beli (*ba'i*) dapat diwujudkan dengan ucapan lisan,tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h 76

<sup>39</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h 29

- 4) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jika melakukan jual beli barang yang belum dimilinya atau memiliki izin dari pemiliknya.<sup>40</sup>
- 5) Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakilah* (perwakilan).<sup>41</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi pihak yang berakad.<sup>42</sup> Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *Mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.<sup>43</sup> *Mumayyiz* adalah berasal dari kata *mayyaza* yang artinya menyingkahkan. Adapun menurut istilah, *mumayyiz* ialah sebutan untuk anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.<sup>44</sup>

Faktor-faktor yang tidak memengaruhi akal, tetapi pelaku tidak bisa berpikir, seperti kondisi lupa, orang yang menghamburkan harta, berutang dan sakaratul maut. Jika kondisi-kondisi tersebut menimpa pelaku akad, maka pelaku tersebut dilarang melakukan transaksi.<sup>45</sup> Kaidah Fiqih yang mendukung batalnya suatu akad ialah:

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا لِجَازَةٍ

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h 104

<sup>41</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... h 67

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... h 69

<sup>43</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h 111

<sup>44</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*,... h 160

<sup>45</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h 36

Artinya:

Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan.<sup>46</sup>

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya: Bank Syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.<sup>47</sup>

#### **d. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Perjanjian jual-beli diantaranya menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu:

##### **1) Pihak Pembeli**

- a) Pembeli wajib menyerahkan uang yang merupakan alat tukar pembelian yang besar nominalnya sesuai dengan kesepakatan.
- b) Pembeli berhak menerima penyerahan barang sebagai objek dalam perjanjian jual-beli.

##### **2) Pihak Penjual**

<sup>46</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'yah*, t.t. : Dar al-Kutub al-'Arabi, tt. Juz II, h 470

<sup>47</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2017), h 131-132

- a) Penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan dalam jual-beli.
- b) Penjual wajib menanggung barang yang terdapat cacat tersembunyi.
- c) Berhak menerima uang pembayaran dari pembeli.

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia dalam kondisi wanprestasi yang menyebabkan adanya sebuah tuntutan dan mengganti kerugian. Jika hanya salah satu yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya maka kondisi ini batal demi hukum. Dalam Islam tidak diperkenankan menuntut kerugian berupa bunga.<sup>48</sup>

#### **e. Risiko**

Risiko dalam suatu perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang menjadikan keadaan barang tersebut mengalami kerusakan, dan keadaan ini tidak dikehendaki kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Risiko menimbulkan konsekuensi yang akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Ssayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaian dalam kerusakan barang sebelum terjadi serah terima, yaitu:

- 1) Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan seorang pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad tetap berlangsung dan pembeli wajib membayar keseluruhan.

---

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia ( Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h 47-48

- 2) Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan menuntut orang lain atau membatalkan akad.
- 3) Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
- 4) Jika sebagian barang rusak perbuatan si penjual, pembeli tidak wajib membayar terhadap kerusakan, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
- 5) Jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antar membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangan.
- 6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau dengan pengurangan pembayaran dari barang tersebut.<sup>49</sup>

#### **f. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam**

Jual beli yang dilarang dalam syariah cukup banyak. Menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual-beli *sahih* dan jual-beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga yaitu *sahih*, *fasid*, dan batal. Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur kezaliman,

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h 48-49



penipuan, dan penindasan.<sup>50</sup> Adapun penulis meringkas mengenai jual beli yang dilarang sebagai berikut.

1) *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh:

a) Jual Beli Orang Gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b) Jual Beli Anak Kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh* tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya, selama mereka melatih kedewasaan anak serta memberikan pengalaman.

c) Jual Beli Orang Buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan

---

<sup>50</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h 192



sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.<sup>51</sup>

## 2) *Sighat*(Ijab Kabul)

### a) Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak menggunakan *ijab-qabul*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab-qabul*, yakni dengan *sighat lafadz*, tidak cukup dengan isyarat, karena keridhaan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang *uzur*.

### b) Jual Beli dengan Tulisan

Disepakati keshahihan *akad* dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Jika isyarat tidak dapat dipahami maupun tulisannya tidak dapat dibaca maka akad tidak sah.<sup>52</sup>

### c) Jual Beli *Munjiz*

---

<sup>51</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 151

<sup>52</sup> *Ibid*, h 153

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut Ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.<sup>53</sup>

#### d) Jual Beli Batal

Jual beli batal apabila barang yang dibeli bukan dari pemilik barang penjual. Jika saat penjualan dilakukan barang yang dijual lenyap, hilang, atau rusak maka batal penjualan tersebut. Akan tetapi, jika mengalami kerusakan terhadap barang maka pembeli dapat memilih pembatalan dan pembelian sisa barang yang masih utuh.<sup>54</sup>

### 3) *Syara'*

#### a) Jual beli *Gharar*

Bentuk barang dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas (*majhul*), seperti menjual barang yang tidak dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.<sup>55</sup> Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan). Seperti menjual ikan di air, menjual bulu di punggung kambing yang

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,.. h 97

<sup>54</sup> Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata*, ( Klaten: Cempaka Putih, 2018), h 53

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h 89

masih hidup, atau buah-buahan di pohon yang belum matang.<sup>56</sup>

b) Jual Beli Riba

Jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran kredit yang mengacu pada bunga yang disertakan dalam jual beli tersebut sehingga harga jual dan harga beli nya menjadi tidak jelas (*gharar fitsaman*). Sementara dalam syariah Islam, dalam jual beli harus ada kepastian harga, antara penjual dan pembeli, serta tidak boleh adanya perubahan yang tidak pasti baik harga maupun pada barang yang diperjual belikan.<sup>57</sup> Riba dikelompokkan menjadi dua macam yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang yaitu riba *qard* dan riba *jahiliyah*, sedangkan riba jual beli yaitu riba *fadh*l dan riba *nasiah*. Riba *qard* adalah riba berupa kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Riba *jahiliyah* riba yang dimana utang dibayar lebih dari pokok peminjaman karena tidak mampu membayar tepat waktu. Riba *fadh*l disebut juga riba *buyu* 'yaitu riba yang terjadi akibat pertukaran barang yang tidak sama jenis, kriteria, kualitas, serta kuatitasnya. Riba *Nasiah* atau riba *duyun* riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak

---

<sup>56</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,.. h 113

<sup>57</sup> Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*,.. h 205

memenuhi kriteria untung yang timbul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama.<sup>58</sup>

c) Jual Beli dengan Syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik. Ulama Malikiyah membolehkan jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah di bolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>59</sup>

d) Jual Beli Barang Haram

Larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. “Allah melaknat *khamar* (minuman keras), peminumnya, penyajinya, penyulingannya, pembawanya, dan pemakan hartanya.” Yang termasuk kategori *khamar* ialah seluruh jenis benda yang memabukkan dari jenis candu, ganja, morfin, heroin, kokain dan sebagainya. Ikut mengedarkan barang-barang tersebut berarti ikut pula dalam bekerja sama dalam perbuatan dosa dan melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah<sup>60</sup> dan dikecam dalam kitab suci-Nya: “Dan janganlah kamu tolong

---

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)h 45

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,.. h 101

<sup>60</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Norma & Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h 157-158

menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran dan bertawakal-lah kamu kepada Allah sesungguhnya amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma’idah ayat 2)

e) *Najsy*

Yaitu menawarkan suatu barang dengan harga tinggi untuk mengguguli tawaran orang lain dengan tujuan untuk menjebak pembeli lain.<sup>61</sup>

4) *Ma’qud ‘Alaih* (Barang Jualan)

a) Jual Beli Barang Yang Najis

Ulama sepakat mengenai larangan jual beli barang yang najis, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

b) Jual Beli Air

Air sumur atau air yang disimpan oleh pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama mazhab empat. Namun, sebaliknya oleh ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak sebab air semua manusia boleh memanfaatkannya.

c) Jual Beli Buah-buahan atau tumbuhan

---

<sup>61</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 127

Para ulama sepakat jika belum terdapat buah maka tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang ,akadnya *fasid* atau rusak. Jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang maka akadnya dibolehkan.<sup>62</sup>

#### 5) Bisnis Spekulatif

Spekulatif adalah suatu kegiatan pembelian sesuatu pada harga murah dengan mengharapkan dapat menjualnya di masa yang akan datang dengan harga mahal. Jika harga suatu objek di masa yang akan datang diharapkan menjadi lebih tinggi daripada harga saat ini, maka seorang pembeli spekulatif akan membelinya dengan sebuah harapan untuk menjualnya di masa yang akan datang.<sup>63</sup>

Suatu hadis Nabi Saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرًا لِمَنْبِيٍّ ص م أَنَّهُ يُخَدَّغُ فِي الْبَيْعِ  
فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar r.a., berkata : “Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah saw. bahwa dia ditipu orang dala jual beli. Maka beliau bersabda, “Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah : tidak boleh ada tipuan.”(HR. Bukhari)<sup>64</sup>

Kegiatan jual beli dengan seperi ini akan mendatangkan *kemudharatan* untuk kedua pihak yakni penjual dan pembeli, bagi pembeli akan merasakan kelangkaan barang karena barang yang

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,.. h 98-99

<sup>63</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*,.. h 131

<sup>64</sup> Zainuddin Hamidy dkk, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari I-IV*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h 266

terlebih dahulu ditimbun oleh penjual yang mengharapkan keuntungan. Sedangkan bagi penjual yang mengharapkan akan mendapat keuntungan di masa yang akan datang akan membeli produk dengan sebanyak-banyaknya. Jika kemudian hari harga produk tersebut menjadi turun maka penjual akan mengalami kerugian.

#### **g. Jual Beli *E-commerce***

*E-commerce* adalah kegiatan komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *elektronik data interchange* dan *automated dat collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antarbisnis, dalam hal ini menggunakan *Elektronik Data Interchange (EDI)*.

Pada perkembangannya *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui *World Wide Web* dengan menggunakan perangkat server yang *secure* menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electric pay*, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 31

*E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.<sup>66</sup> Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad tertulis, ( *E-mail*, *Short Massagr Service/SMS*, *Blackberry Massage/BBM*, *WhasApps*, *Direct Massage/DM*, *Facebook* dan sejenisnya). Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Jika rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi seperti ini sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>67</sup>

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْكِتَابُ كَالْخَطِّ

Artinya:

---

<sup>66</sup>*Ibid*, h 32

<sup>67</sup>*Ibid*, h 33



Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”<sup>68</sup>

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-relaan, baik saat para pihak yang melakukan akad ada maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.<sup>69</sup>

## 2. Transaksi Elektronik

### a. Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan atau media elektronik lainnya. Sedangkan kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan melalui media elektronik disebut kontrak elektronik. Dengan demikian pengertian transaksi elektronik lebih luas dari kontrak

---

<sup>68</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Digital Library, juz I al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005) h 204

<sup>69</sup> Anonim, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani Juz II, 2005) h 10934

elektronik. Kontrak elektronik hanya satu aspek saja dari pengertian transaksi elektronik.<sup>70</sup>

## **b. Dasar Hukum Transaksi Elektronik**

### **1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Perikatan yaitu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih, pihak satu untuk memenuhi hak prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi, dan sebaliknya.<sup>71</sup> Menurut R.Subekti tidak menggunakan istilah hukum perikatan, tetapi menggunakan istilah *perikatan* sesuai dengan Buku III KUH Perdata tentang perikatan dalam bukunya yang berjudul , beliau menulis perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, di dalam Buku III KUH Perdata memuat tentang perikatan yang berasal dari;

- a) Persetujuan atau perjanjian;
- b) Perbuatan yang melanggar hukum;
- c) Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Makna perikatan yang lebih luas dari perjanjian yaitu sebab perjanjian (kontrak), dan bukan dari perjanjian (dari undang-undang). Perjanjian ialah suatu pihak

---

<sup>70</sup> Arsensius, “Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi elektronik di indonesia” ( On-line), tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/211902/aspek-aspek-hukum-perdata-internasional-dalam-transaksi-elektronik-di-indonesia> (29 Februari 2020).

<sup>71</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), h 28

yang berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan.<sup>72</sup>

Transaksi secara elektronik lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang mana setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian/perikatan asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya. Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perikatan dengan bentuk, cara serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut, dalam hal ini para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet pula, jadi mereka saling berhubungan melalui internet.<sup>73</sup>

Pada dasarnya dalam transaksi secara elektronik, pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban. Pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, seorang pelaku usaha wajib memberikan informasi secara benar, jujur dan patut atas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen atas barang yang dijualnya,

---

<sup>72</sup>*Ibid* h 30

<sup>73</sup> Hetty Hasanah, “ Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (e- Commerce ) Berdasarkan Burgelijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1 (Februari 2015), h 41

pelaku usaha juga berhak mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi secara elektronik ini.<sup>74</sup>

Asas konsensualisme transaksi elektronik dapat disebut dengan suatu bentuk perjanjian yang lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak.<sup>75</sup> Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata , yaitu :

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c) Adanya objek tertentu
- d) Adanya sebab yang halal<sup>76</sup>

Pasal 1320 KUHPdata telah diatur syarat sahnya perjanjian dimana secara umum terdapat syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif ( hal tertentu dan sebab yang halal ). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli e-commerce tersebut batal demi hukum. Melalui syarat sahnya kontrak dalam pasal 1320 KUHPdata yang diterapkan dan diintegrasikan ke dalam transaksi jual beli e-

---

<sup>74</sup>Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-beli Melalui *E-Commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Februari-Juli 2014), h 293

<sup>75</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*,.. h 31

<sup>76</sup> Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal De Lega Lata*, Vol I, No. 2 (Juli-Desember 2016), h 436

commerce akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi jual beli e-commerce.<sup>77</sup>

*Pertama*, kesepakatan kedua belah pihak. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian.<sup>78</sup> Di dalam Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiada suatu kesepakatan yang dilakukan secara kehilafan atau diperoleh paksaan dalam suatu tekanan pihak tertentu.<sup>79</sup>

*Kedua*, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dimana hal ini adalah kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa adanya gangguan. Perbuatan hukum ini mengarah pada transaksi jual beli e-commerce, mengenai syarat kecakapan hukum tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, untuk mengukur syarat kecakapan para pihak dalam kontrak jual beli e-commerce sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan atau sistematika di dalam KUHPerdata, sehingga para pihak dapat dikatakan cakap hukum

---

<sup>77</sup> Santonius Tambunan, “ Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-beli *e-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata”. *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, (April 2016 ), h 190-191

<sup>78</sup> Ridwan Khairandy, “ Pembaruan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce”. *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 16, ( Maret 2001), h 47

<sup>79</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*,.. h 31

adalah tunduk pada sistematika KUHPerdara yaitu berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.<sup>80</sup> Seorang yang dikatakan tidak cakap hukum dalam pasal 1330 KUHPerdara yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu persetujuan tertentu.<sup>81</sup>

*Ketiga*, Objek tertentu. Adapun yang menjadi syarat suatu objek tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara adalah proses prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.<sup>82</sup> Hal tertentu mengenai suatu objek hukum berupa jenis barang, kualitas dan mutu barang, pabrik pembuat suatu barang, tahun pembuatan barang, warna barang, ciri khas suatu barang, jumlah suatu barang, deskripsi atau uraian mengenai spesifikasi barang.<sup>83</sup>

*Keempat*, sebab yang halal. Syarat ini tidak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara dihubungkan dengan konteks Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara, suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>80</sup> Santonius Tambunan, “ Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-beli *e-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata”. *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, (April 2016 ), h 196

<sup>81</sup> Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata*, ( Klaten: Cempaka Putih, 2018), h 51

<sup>82</sup> Santonius Tambunan, “ Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-beli *e-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata”. *Badamai Law Jurnal*.... h 197

<sup>83</sup> Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata*,... h 51-52

yang mengikat atau batal demi hukum jika kontrak tersebut; tidak mempunyai sebab, sebanya palsu, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum. Syarat sebab yang halal berlaku pada kontrak jual beli *e-commerce*, sehingga menjadi suatu bukti bahwa kontrak tersebut menjadi sebuah perjanjian pada umumnya. Demikian terkait dengan syarat suatu sebab yang halal sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan atau sistematika dalam KUHPerdata.<sup>84</sup> Sehingga dapat dipastikan diperbolehkan menurut hukum yang kuat.

## 2) Undang-Undang Perdagangan

Pasal 65 UU Perdagangan mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya.<sup>85</sup> Pasal tersebut telah memuat beberapa poin penting yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sehingga dapat melindungi pelaku usaha tanpa mengurangi perlindungan konsumen. Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan disebutkan:

- a) Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
- b) Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- c) Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;

---

<sup>84</sup> *Ibid* h 198

<sup>85</sup> Diky Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-48*, No. 3 (Juli-September 2018), h 656



- d) Harga dan cara pembayarann barang dan/atau jasa; dan
- e) Cara penyerahan barang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) mendefinisikan perdagangan sebagai berikut:

*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.*

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan didefinisikan sebagai perdagangan melalui sistem elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 24 UU Perdagangan yang berbunyi:

*Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.*

Sehingga dapat diasumsikan yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan atas barang dan/atau jasa dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>86</sup>

### 3) UU ITE dan PP PSTE

---

<sup>86</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56751b308cb0/perbedaan-perdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik/>. Diakses pada tanggal 11/06/2020, pukul 20.09 WIB



Syarat dalam transaksi elektronik untuk pelaku usaha dan konsumen terdapat pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012 PSTE) yaitu :

- a) Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- b) Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan
  - 1) Iktikad baik;
  - 2) Prinsip kehati-hatian;
  - 3) Transparansi;
  - 4) Akuntabilitas; dan
  - 5) Kewajaran.<sup>87</sup>

Persyaratan transaksi elektronik mengenai kecakapan hukum pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012 PSTE) yaitu:

- a) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak
- b) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
  - 1) Terdapat kesepakatan para pihak;

---

<sup>87</sup> Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang yang meakili sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terdapat hal tertentu; dan
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>88</sup>

Pada Pasal 48 PP PSTE menjelaskan kelanjutan Pasal 47 mengenai kontrak elektronik yang paling sedikit memuat tentang data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum sebagai penyelesaian transaksi elektronik. Pasal 49 menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- b) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran dan iklan.

---

<sup>88</sup>Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- c) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- d) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Pada Pasal 50 menjelaskan tentang kesepakatan para pihak yaitu:

- a) Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima.
- c) Kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
  - 2) Tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.

Pasal 51 menjelaskan tentang kewajiban para pihak yaitu:

- a) Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihak wajib menjamin:
  - 1) Pemberian data dan informasi yang benar; dan

2) Ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.

b) Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik.

Di dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi dan Elektronik (PP PSTE) telah mengatur tentang sikap pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan produk atau barang melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang benar sesuai kondisi barang yang akan ditawarkan kepada konsumen.<sup>89</sup> Pada Pasal 25 PP PSTE Penyelenggara sistem elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen wajib menyampaikan informasi yaitu:

- a) Identitas penyelenggara sistem elektronik;
- b) Objek yang ditransaksikan;
- c) Kelaikan atau keamanan sistem elektronik;
- d) Tata cara penggunaan prangkat;
- e) Syarat kontrak;
- f) Prosedur kontrak;

---

<sup>89</sup>*Ibid* h 296-297

g) Jaminan privasi dan/atau perlindungan data pribadi.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses transaksi elektronik dalam UU ITE dan PP PSTE terdapat banyak persamaan, perbedaannya hanya pada Pasal 47 PP PSTE yang membahas mengenai kecakapan hukum.

### c. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik

#### 1) *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan, transaksi ini dilakukan untuk menjalin suatu perusahaan yang berperan sebagai penjual dan pembeli dan bukan perorangan.

#### 2) *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi yang dilakukan antara perusahaan (penjual) dengan konsumen (pembeli) secara individu. Transaksi ini disebarkan secara umum, konsumen yang mempunyai inisiatif dalam melakukan transaksi.

#### 3) *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi yang dilakukan antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

#### 4) *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang dilakukan individu untuk menjual pada perusahaan.

#### 5) *Non-Business Electronic Commerce*

---

<sup>90</sup>Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Transaksi yang dilakukan dalam kegiatan non bisnis seperti kegiatan organisasi, lembaga pendidikan, keagamaan dan lain-lain.

6) *Intrabusiness (Organizational) Elektronik Commerce*

Kegiatan pertukaran barang, jasa, informasi yang dilakukan internal organisasi melalui internet.

7) *Governer to Citizens (G2C)*

Suatu kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan, selain itu sebagai pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*.

8) *Mobile Commerce*

Penggunaan internet tanpa kabel.<sup>91</sup>

**d. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab dalam Transaksi Elektronik**

Bentuk-bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK adalah sebagai berikut:

1) *Contractual liability*

Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak elektronik dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2) *Product liability*

Tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan

---

<sup>91</sup>Aprillita Zainati, “ Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. (Skripsi Progran Sarjana Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, 2018), h 89

produk yang dihasilkannya. Pertanggung jawaban ini diterapkan dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dan konsumen.

### 3) *Professional liability*

Dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen.



### 4) *Criminal liability*

Dalam hubungan pelaku usaha dengan negara memelihara keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).<sup>92</sup>

## e. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik ialah pelaku usaha, konsumen, pembayaran, dan jasa pengiriman barang.

---

<sup>92</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html> diakses pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 20.04 WIB

### 1) Pelaku Usaha

Pelaku usaha berperan dalam membuat situs *website* atau akun bisnis lainnya, kemudian menyiapkan katalog produk dalam bentuk digital serta memberikan informasi terkait produk secara jujur dan benar.

### 2) Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai:

*Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Tampaknya dari artian tersebut masih terdapat kekurangan karena masih banyak hal yang tidak mencakup sebagai konsumen, seperti badan hukum, badan usaha, dan adanya batasan-batasan.<sup>93</sup> Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk

---

<sup>93</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), h 4



diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*,) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau mencari keuntungan kembali.<sup>94</sup>

### 3) Pembayaran

Sistem pembayaran dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan berbagai cara pembayaran sebagai berikut:

#### a) Transfer Antar Bank

Transfer antar bank dilakukan dengan konsumen membayar melalui ATM, kemudian pembayaran dapat dilakukan dengan memasukkan kode bank. Transfer antar bank dapat dilakukan melalui aplikasi seperti *mobile banking*, lebih efisien dan mempercepat sistem pembayaran.

#### b) Setor Tunai

Setor tunai hanya dapat ditujukan kepada bank yang sama. Konsumen hanya perlu datang ke bank dengan membawa uang yang akan dikirimkan sesuai jenis bank yang akan dituju melalui teller bank. Kelebihan dari setor tunai konsumen dapat mengirim uang tanpa menjadi nasabah bank untuk membuat

---

<sup>94</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 17

buku tabungan dan rekening. Kekurangan dari setor tunai konsumen harus menuju bank yang sejenis dan akan memakan waktu yang cukup lama.

c) COD (*Cash On Delivery*)

Pembayaran dilakukan ketika pelaku usaha sudah mengantarkan barang dan konsumen sudah menerima barang tersebut. Kelebihan dari transaksi ini konsumen dapat kembali mengecek barang yang akan diterima sebelum membayarnya. Kelemahan dari transaksi ini konsumen dapat membatalkan secara sepihak barang yang sudah dipesan jika tidak sesuai.

d) Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga *escrow*. Pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer antar bank. Jika dalam transfer antar bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan sistem rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, dana tersebut akan diberikan pelaku usaha.<sup>95</sup>

e) Kartu Kredit

---

<sup>95</sup>Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", (Skripsi Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015), h 58

Kartu kredit adalah sebuah kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan tertentu, digunakan untuk pelunasan pembayaran secara kredit.<sup>96</sup>

#### 4) Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang bisa dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, jika jarak antara konsumen dan pelaku usaha dapat ditempuh dalam waktu beberapa menit atau masih dalam wilayah tempat pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menggunakan jasa pengiriman barang jika konsumen berada diluar wilayah pelaku usaha.

#### f. Mekanisme Transaksi Elektronik

Mekanisme dalam transaksi elektronik, hal pertama yang perlu dilakukan oleh konsumen yaitu mengakses situs yang menyediakan belanja online melalui *website*, *facebook*, *marketplace* dan akun lainnya yang masih berhubungan dengan transaksi online. Setelah masuk dalam situs tersebut konsumen akan diarahkan untuk melihat menu dan barang yang diinginkan. Dalam menu tersebut terdapat barang dan harga yang sudah ditampilkan bertujuan agar konsumen mudah dalam menghitung *budgeting* yang dimilikinya. Jika sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya dan setelah itu konsumen hanya perlu menunggu barangnya sampai tujuan.

Adapun saat ini konsumen bisa berkomunikasi dengan pelaku usaha melalui *whatsApps*, *direct message*, *inbox* dan lainnya, sehingga

---

<sup>96</sup> Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h 194

memudahkan konsumen untuk yakin terhadap barang yang akan dipesan. Konsumen dengan mudah berkomunikasi dengan pelaku usaha secara langsung untuk mengirimkan bukti transfer secara langsung, sehingga setelah terkonfirmasi, pelaku usaha dapat mengirimkan barang secepatnya melalui jasa pengiriman barang. Setelah itu, konsumen menunggu barang yang dibelinya dalam waktu seminggu.<sup>97</sup>

Pelaku usaha juga dapat mengirimkan barang tanpa menggunakan jasa pengiriman barang, jika konsumen berada dalam satu wilayah dengan pelaku usaha. Pelaku usaha mengantarkan barang kepada konsumen dan pembayaran dilakukan secara tunai atau biasa disebut COD (*Cash On Delivery*).

#### **g. Permasalahan dalam Transaksi Elektronik**

##### **1) Kecakapan Hukum**

Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 47 PP 82/2012 PSTE mengatur bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus didasari dengan kecakapan hukum. Jika pelaku usaha maupun konsumen belum cakap hukum maka transaksi elektronik batal demi hukum. Kecakapan hukum mempengaruhi pola pikir seorang agar dapat melakukan transaksi elektronik dengan baik dan benar.

##### **2) Barang Tidak Sesuai Pesanan**

---

<sup>97</sup> Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", (Skripsi Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015), h 58-59

Pelaku usaha mengirimkan barang tidak sesuai dengan katalog yang ditampilkan di situs jual beli *online*. Hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan ketika barang yang sampai tidak sesuai yang sudah dipesan.

### 3) Harga Terlampau Murah

Harga yang murah tentu saja menjadi incaran para konsumen, namun tanpa disadari konsumen yang berburu barang murah akan menerima barang yang tidak sesuai dengan kondisi yang layak.

## ***h. Cyber Crime***

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.<sup>98</sup> *Cyber law* adalah hukum yang digunakan di dunia maya (*cyber space*) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. *Cyberlaw* merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat *online* dan memasuki dunia *cyber* atau dunia maya.

Kualifikasi kejahatan dunia maya (*cyber crime*), yaitu sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh JinayahI*, (Jakarta; Amzah, 2018), h 185

- 1) *Illegal access*, yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
- 2) *Illegal interception*, yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan memancarkan data komputer yang tidak bersifat publik, dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
- 3) *Data interception*, yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan, atau penghapusan data komputer.
- 4) *System interference*, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
- 5) *Misuse of Device*, yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, *password* komputer, kode masuk (*access code*).
- 6) *Computer related forgery*, yaitu pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik.
- 7) *Computer related fraud*, yaitu penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya sistem komputer/sistem

komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi atau orang lain.<sup>99</sup>

### **3. Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

#### **b. Asas Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa perlindungan konsumen memiliki asas sebagai berikut:

##### **1) Asas Manfaat**

Asas manfaat untuk mengamanahkan bahwa mengupayakan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan segalam manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

##### **2) Asas Keadilan**

Asas keadilan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan hak dan kewajiban secara maksimal kepada konsumen dan pelaku usaha secara adil.

---

<sup>99</sup>*Ibid*, h 187

### 3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha secara materiel ataupun spiritual.

### 4) Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pihak konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

### 5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Serta negara dapat menjamin kepastian hukum.

## **c. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pasal 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari kegiatan negatif pemakaian barang/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;



- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>100</sup>

#### **d. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha**

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak terlepas dari Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen. Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Toman Soni Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2019), h 247-248

<sup>101</sup>Abdul Astar dan Rani Apriyani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) h 31-32

Perlindungan konsumen adalah hak asasi yang sudah sewajarnya didapatkan oleh konsumen. Konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang berada dalam masyarakat, baik kepentingan pribadi, keluarga, maupun makhluk lain (misal: hewan peliharaan).

Kedudukan konsumen terhadap produsen sebaiknya seimbang , menjadi lemah karena rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adapun hak-hak konsumen ialah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengkata perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti *rules* atau petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar dan tempo waktu yang disepakati.<sup>102</sup>
- 4) Menyetujui barang dan/atau jasa yang dipilih.
- 5) Menjunjung tinggi konsisten terhadap suatu barang dan/atau jasa.
- 6) Tidak membatalkan perjanjian secara sepihak.

Kegiatan usaha sudah banyak didapatkan melalui berbagai media elektronik dengan mudah dan lengkap yang sudah tersaji di berbagai situs ataupun *website*. Saat ini terdapat banyak pelaku usaha yang sukses hanya dengan modal minimum. Berbagai

---

<sup>102</sup>*Ibid*, h 40-41

kebutuhan yang ditawarkan oleh pelaku usaha dengan konsumen yang saling membutuhkan satu sama lain.<sup>103</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu terkait hak kepada pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan produk hingga sampai ke tangan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang datur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>103</sup>*Ibid*, h 49-50

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yang berarti pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan membedakan mutu pelayanan kepada konsumen;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan dan/atau rugi penggantian atas kerugiannya akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti dan dan/atau rugi penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Lihat pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 1999).<sup>104</sup>

#### **e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

---

<sup>104</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 101-102

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan suatu persoalan yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen. Perlindungan perdagangan barang dan/jasa, memiliki tujuan utama dari pelaku usaha yaitu mendapatkan keuntungan (yang berlaku sebagai hak). Asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tidak lain dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>105</sup>

#### **f. Larangan-Larangan Bagi Pelaku Usaha**

Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu larangan dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar mengenai kondisi suatu barang dan/atau jasa. Dalam periklanan pelaku usaha dilarang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang serta memuat informasi yang keliru terhadap barang dan/atau jasa.<sup>106</sup>

#### **g. Lembaga-lembaga Yang Berperan Perlindungan Konsumen**

---

<sup>105</sup> *Ibid*, h 113

<sup>106</sup> Abdul Astar dan Rani Apriyani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*,... h 54-59

### 1) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa konsumen karena memenuhi syarat, sehingga lembaga ini mempunyai kesempatan untuk dapat berperan aktif di dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang tercantum dalam Bab XI mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Pasal 44 ayat (3), menyatakan bahwa tugas dari LPKSM yaitu:<sup>107</sup>

- a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen;
- d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.<sup>108</sup>

### 2) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

---

<sup>107</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h

Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan lembaga perlindungan konsumen yang memiliki kedudukan di Ibukota Republik Indonesia serta bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga Jika diperlukan BPKN ini dapat membentuk perwakilan di Ibukota Daerah Provinsi untuk membantu dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga Pemerintah di dalam penyusunan kebijakan di bidang hukum perlindungan konsumen.
- b) Melakukan penelitian dan juga pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam ranah perlindungan hukum terhadap konsumen.
- c) Melakukan penelitian dan pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan jiwa konsumen.
- d) Memberikan dorongan terhadap perkembangannya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- e) Memberikan informasi melalui media masa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan menunjukkan sikap berpihaknya masyarakat kepada konsumen.
- f) Menerima pengaduan mengenai perlindungan konsumen dari masyarakat, maupun lembaga perlindungan konsumen



swadaya masyarakat atau pelaku usaha dalam sengketa konsumen, dan

g) Melakukan survei terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen.<sup>109</sup>

### 3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota, di mana lembaga tersebut memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>110</sup>

Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga akan tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besar ganti-rugi, atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak adanya terjadi kerugian kembali yang dialami oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen di dalam Pasal 52 juga telah mengatur tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan/atau konsiliasi;
- b) Memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen;

---

<sup>109</sup>*Ibid*, h 109-110

<sup>110</sup>*Ibid*, h 111

- c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula buku;
- d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian yang diderita oleh pihak konsumen;
- l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan undang-undang ini.<sup>111</sup>

#### 4) Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan.<sup>112</sup> Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan informasi kepada konsumen;
- b) Menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;
- c) Mengolah dan melanjutkan informasi yang telah diperoleh dari konsumen; dan
- d) Memantau proses pemecahan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dan menyampaikan hasilnya kepada kedua belah pihak.

Balai Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu unit pelayanan yang bersifat independen, yaitu lembaga ini tidak berpihak kepada salah satu pihak, baik pihak produsen sebagai pengedar barang dan/atau jasa, pemerintah maupun masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan produk barang dan/atau jasa pemerintah maupun masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan produk barang

---

<sup>111</sup>*Ibid*, h 112-113

<sup>112</sup>*Ibid*, h 119

dan/atau jasa.<sup>113</sup> BPOM adalah pengawasan terhadap cara pengolahan maupun bahan campuran yang dimasukkan dalam produk makanan, minuman, atau obat-obatan yang diproduksi oleh produsen. Cara pengolahan yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mengandung zat yang menyebabkan produk tersebut menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Pengawasan yang dilakukan terhadap setiap produk yang diedarkan melalui pelaku usaha dengan cara mengambil sampel dari produk yang dihasilkan oleh produsen kemudian diuji di laboratorium, jika terbukti produk ditemukan tidak aman untuk dikonsumsi yang cenderung menimbulkan akibat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka produk tersebut akan ditarik dari peredaran pasar.<sup>114</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dapat diperoleh dari berbagai sumber penelitian seperti jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menghubungkan terhadap berbagai penelitian untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman secara menyeluruh terhadap penelitian dalam suatu pembahasan sebelumnya pada implementasi peraturan pemerintah no 82 tahun 2012 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, h 121

<sup>114</sup> *Ibid*, h 122

<sup>115</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), h 208

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadlan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan *Sadd Adz-Dzari’ah*” .<sup>116</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan *Sadd adz-dzari’ah* yaitu meneliti pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan *sadd adz-dzari’ah* terhadap kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* tidak terbatas atau sangat bebas pelaksanaannya, baik dari segi pemasaran, pengiklanan dan penjualannya. Hal ini terjadi akibat belum efektifnya pelaksanaan PP PSTE dan UU ITE oleh penyelenggara sistem elektronik. PP PSTE dan UU ITE belum mengatur secara detail mengenai penjualan alat kontrasepsi secara *online*. Sedangkan, dalam *Sadd adz-dzari’ah* mengenai jual beli alat kontrasepsi harus dilarang dan/atau dihukum. Jual beli alat kontrasepsi

---

<sup>116</sup> Nur Fadlan, “Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan *Sadd Adz-Dzari’ah*”. ( Skripsi Program Sarjana Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h 13

secara *online* seharusnya dikontrol penyelurannya, pemasarannya dan peredarannya oleh satu pintu atau melalui lembaga *contraception center*. Pada pasal 46 PP PSTE disebutkan bahwa : 1. Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak, 2. Penyelenggara transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan a) I'tikad baik b) Prinsip kehati-hatian c) Transparansi d) Akuntabilitas, dan e) Kewajaran. Pada pasal 46 tersebut tepatnya ayat 2 huruf a dan e dapat dijadikan jaring hukum terdapat penyebaran pornografi dalam iklan alat kontrasepsi. Pelaku usaha harus memiliki i'tikad baik dalam menjual alat kontrasepsi secara *online*, dengan tidak menjualnya kepada pihak yang belum berhak untuk membeli alat kontrasepsi. Dalam teori *sadd adz-dzari'ah* hukum jual beli dalam kasus alat kontrasepsi hukumnya adalah tidak diperbolehkan dengan ketentuan bahwa alat kontrasepsi digunakan oleh orang yang belum berhak/legal menggunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusnedi “Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Indagiri (STIE-I) Rengat” berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Proses Transaksi Usaha Online Di Rengat”.

<sup>117</sup>Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan melalui survey dan kuisioner. Penelitian ini menjelaskan perkembangan bisnis berbasis online semakin tidak terkendali dan cenderung menjadi bisnis yang sangat rentan terhadap penipuan. Untuk mengendalikan dampak negatifnya maka Konsumen harus mendapat perlindungan hukum dalam melakukan

---

<sup>117</sup> Yusnedi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Proses Transaksi Usaha Online Di Rengat”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7 No. 01 (Maret 2018), h 33

transaksi pembelian online. Sebagai salah satu upaya Pemerintah telah berupaya melindungi konsumen transaksi online dengan mengeluarkan PP PSTE tahun 2012 yang mengatur kewajiban pelaku usaha online untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses transaksi sesuai PP PSTE tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses transaksi usaha online di kota Rengat. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan 40 responden pelaku usaha online.

Lebih dari 70% responden telah menyampaikan informasi lengkap dan benar mengenai produk (harga, kualitas, merek, spesifikasi) yang ditawarkan, akan tetapi ada sekitar 30% responden yang tidak memberikan jaminan kecacatan dan tidak mencantumkan kontrak dan prosedur pembayaran dalam websitenya. Seluruh responden menyatakan telah menyampaikan informasi mengenai barang yang dikirim kepada konsumen melalui SMS, messenger ataupun telepon. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen berdasar PPPSTE 2012 oleh responden pelaku usaha online berada dalam kategori “tidak baik” dimana pelaku usaha online hanya menyampaikan informasi produk dan proses transaksi kepada konsumen secara subjektif tanpa mengacu pada peraturan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suwari Akhmaddhian dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Asri Agustiwi dari Fakultas Hukum Universitas



Surakarta dengan judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di indonesia”.<sup>118</sup> Penelitian ini menjelaskan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: *Pertama*, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; *Kedua*, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fajriatul Izmi, Jurusan Hukum Bisnis syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Malik Ibrahim dengan judul “Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Tiket Online (studi kasus Regulasi tentang Transaksi Online)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

<sup>118</sup> Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di indonesia”. *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976, Vol. 3 No. 2 ( Juli 2016), h 40



penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan *library resrarch* (studi kepustakaan), yang dilakukan dengan Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum yaitu terlebih dahulu peneliti mengangkat kasus yang akan dibahas kemudian mengumpulkan bahan hukum, yang didapatkan dari sumber yang mendukung pada penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisa terhadap menaggapi konsumen yang tertipu oleh agen tiket pesawat online, menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sisten dan Transaksi elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tahap terakhir yaitu dilakukan analisis dan sistematis sehingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menggunakan upaya pembinaan dan pendidikan konsumen tiket online perlu menjadi perhatian maupun pihak penyelenggara jasa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Bulan Tri Laksmi Devi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Makalah yang berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik dalam Transaksi Online". Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini mengenai cacat tersembunyi pada barang yang dikirim atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu terhadap konsumen untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana dilandasi dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada barang elektronik dalam transaksi online dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Amila Desiani, Muhammad Amirulloh, Agus Suwanto dengan judul “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara dengan Lazada Express. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumen dan wawancara.<sup>119</sup> Hasil penelitian ini dapat disimpulkan adanya UU ITE dan PP PSTE, maka hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar telah dijamin melalui ketentuan Pasal 9

---

<sup>119</sup> Amila Desiani, Muhammad Amirulloh, Agus Suwanto, “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik”. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol 2, No. 1, Desember 2018, h 59

UU ITE dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) PP PSTE mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar. Informasi yang lengkap dan benar terkait identitas pelaku usaha, barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Serta syarat dan ketentuan berlaku. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak, seperti halnya perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli berbasis *ecommerce* berlaku dan mengikat para pihak apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa salah satu syarat mengenai pembatalan suatu perjanjian adalah harus dengan putusan hakim, tetapi berdasarkan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak *marketplace*, pasal tersebut telah dikesampingkan sehingga pembatalan transaksi dapat dilakukan tanpa memerlukan keputusan dari pengadilan. Asas itikad baik juga ditentukan dalam Pasal 3 UU ITE. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa subyek hukum yang utama terlibat transaksi *ecommerce* adalah pelaku usaha dan konsumen, mereka dalam melakukan transaksi *ecommerce* harus di dasari dengan itikad baik agar tidak saling merugikan satu sama lain.<sup>120</sup> Lazada dalam kenyatannya melakukan pembatalan transaksi secara sepihak tanpa mengkonfirmasi kepada konsumen terlebih dahulu dikarenakan adanya kesalahan dalam pencantuman suatu informasi.<sup>121</sup> Tanggung jawab situs belanja *online* dalam penerapan asas itikad baik dalam pembatalan

---

<sup>120</sup> *Ibid* h 64

<sup>121</sup> *Ibid* h 65

penerapan asas itikad baik dalam hal pembatalan transaksi sepihak akibat kesalahan pencantuman suatu informasi dalam bentuk pertanggung jawaban secara *contractualiability* adalah wajib memberikan ganti kerugian yang didasarkan pada negosiasi terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK dan Pasal 39 ayat (2) UU ITE untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang akan diberikan.<sup>122</sup>

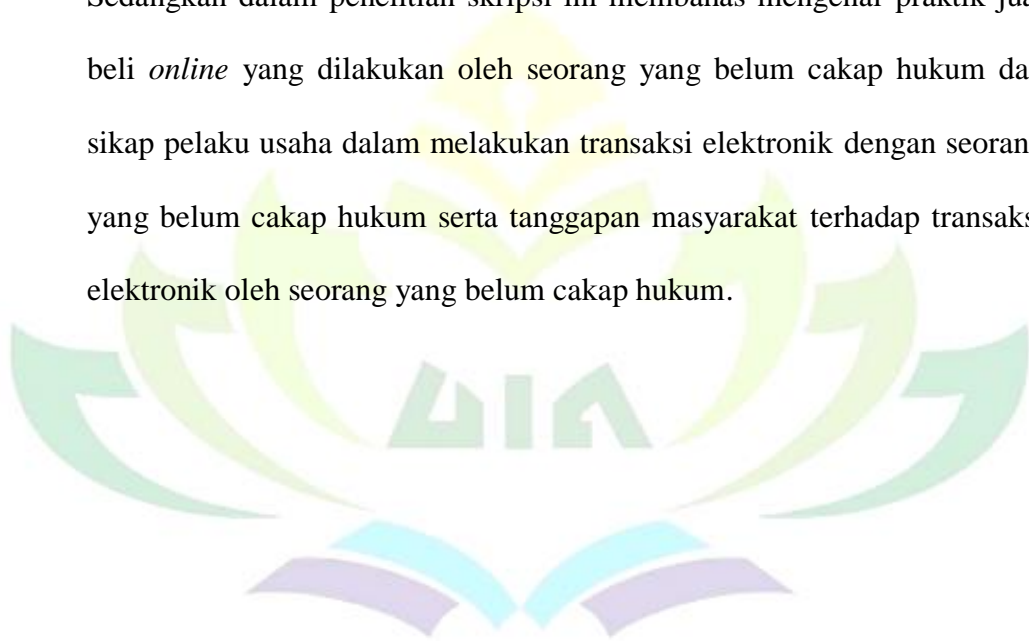
7. Penelitian yang dilakukan oleh Masitoh Indryani, Nilam Andriana Kusuma Sari dan Satria Unggup W. P yang berjudul “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif ( *legal research* ) dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *case approach* serta *comperative approach*. Hasil dari penelitian ini terkait dengan hukum yang tersedia bagi korban pelanggaran hak privasi sesuai regulasi hukum Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dapat melakukan gugatan kerugian secara perdata, artinya bahwa mekanisme hukum menuntut ganti rugi dari pengguna daring kepada penyedia *e-commerce* yang baru tersedia mekanisme meminta ganti rugi keperdataan.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup>*Ibid* h 68

<sup>123</sup> Masitoh Indryani, Nilam Andriana Kusuma Sari dan Satria Unggup W. P. “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System”. *Justia Jurnal Hukum*, Vol I No. 2, Oktober 2017, h 207

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diperoleh, pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sangat penting sebagai pendukung dalam skripsi ini. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah titik fokus pada suatu kasus permasalahan. Penelitian sebelumnya membahas mengenai yang dilakukan pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh seorang yang belum cakap hukum dan sikap pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik dengan seorang yang belum cakap hukum serta tanggapan masyarakat terhadap transaksi elektronik oleh seorang yang belum cakap hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an , Tafsir, dan Hadis**

- Ash-shiddieqy, Hasby , 2002 *Mutiara Hadis V*, Jakarta: Handayani, 1977
- Hamidy, Zainuddin,-----, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari I-IV*, Jakarta: Widjaya, 1992
- Sunarto dkk, Achmad, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: Asy-Syifa', 1993
- Quraish Shihab, M. , *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah-Al-Baqarah) Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Ali Imran- An-Nisa' 70) Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- , Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim jilid 2*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016
- , Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 1*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016

### **Buku**

- A. Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, *Metode Peneliti*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ahmad Said, Hasani *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, Bandar Lampung: Syariah Press, 2014
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Norma & Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2018
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia ( Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Astar, Abdul dan Rani Apriyani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Dewi, Eli Wuria *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Djamil, Fathurahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Fatah, Rohadi Abdul , *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012
- Harahap, Isnaini-----, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Hidayat, Syarifuddin dan Sedamayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta; Amzah, 2018



- Izzan, Ahmad, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2013
- Khoerudin, Koko dan Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019
- Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pranamedia Group, 2015
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Ngani, Nica, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Huku*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Rizki Sridadi, Ahmad, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Sharif Chaudhry, Muhammad , *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010



Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Suparyanto, Yudi, *Hukum Perdata*, Klaten: Cempaka Putih, 2018

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers, 2018

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

Tambunan, Toman Soni dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2019

Timotius, Kris H, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offest, 2017

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Wajadi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Yusuf, A. Muri , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014

Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad *Halal & Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016

### **Kamus , Jurnal, Skripsi, Makalah**

Akhmaddhian, Suwari dan Asri Agustiwi, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di indonesia. *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976, Vol. 3 No. 2, Juli 2016

Alhafidz, Ahsin W, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013

Bulan Tri, Komang dan Ni Ketut Supasti, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online*, Makalah Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana,

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011
- Deky Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-48*, No. 3 Juli-September 2018
- Desiani, Amila, Muhammad Amirulloh, Agus Suwantono, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik". *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol 2, No. 1, Desember 2018
- Fadlan, Nur, *Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-Dzari'ah*, Skripsi Program Sarjana Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017
- Hasanah, Hetty, Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (e- Commerce ) Berdasarkan Burgelijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015
- Indryani, Masitoh, Nilam Andriana Kusuma Sari dan Satria Unggup W. P. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System". *Justia Jurnal Hukum*, Vol I No. 2, Oktober 2017
- Izmi, Fajriatul, *Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Penjual Tiket Online (studi kasus Regulasi Tentang Transaksi Online)*, Skripsi Program Sarjana Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018
- Khairandy, Ridwan, "Pembaruan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce". *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 16, Maret 2001

Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 1999

Nisrina, Disa Nusia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Skripsi Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015

Pane, Dewi Kartika, Implementasi Data Mining Pada Penjualan Produk Algoritma Apriori (studi Kasus : Kreditplus). *Pelita Informatika Budi Dharma*, Vol. IV No. 26, Agustus 2013

Putra, Setia, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-beli Melalui *E-Commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Februari-Juli 2014

Syafriana, Rizka, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal De Lega Lata*, Vol I, No. 2, Juli-Desember 2016

Tambunan, Santonius " Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-beli *e-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata". *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, April 2016

Yusnedi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Proses Transaksi Usaha Online Di Rengat, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 7 No. 01, Maret 2018

Zainati, Aprillita " Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi Progran Sarjana Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, 2018

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### **Sumber on-line**

Arsenius, "Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Di Indonesia" (On-line), tersedia di:

<https://www.neliti.com/publications/211902/aspek-aspek-hukum-perdata-internasional-dalam-transaksi-elektronik-di-indonesia> (29 Februari 2020).

Kemenkumham, “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 Tahun 2008” (On-Line), tersedia di: [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html) (19 Juni 2020)

Made Wahyu Athaluhur, “Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik” (On-Line), tersedia di: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56751b308cb0/perbedaan-perdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik/> (11 Juni 2020)

